



MEMPERKUAT SINERGI DAN MENINGKATKAN EFEKTIFITAS DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Rabu, 24 Juni 2020



OUTLINE

1

PROFIL REFOCUSING DAN
REALOKASI APBD

2

STRANAS PK

3

PENGELOLAAN BMD

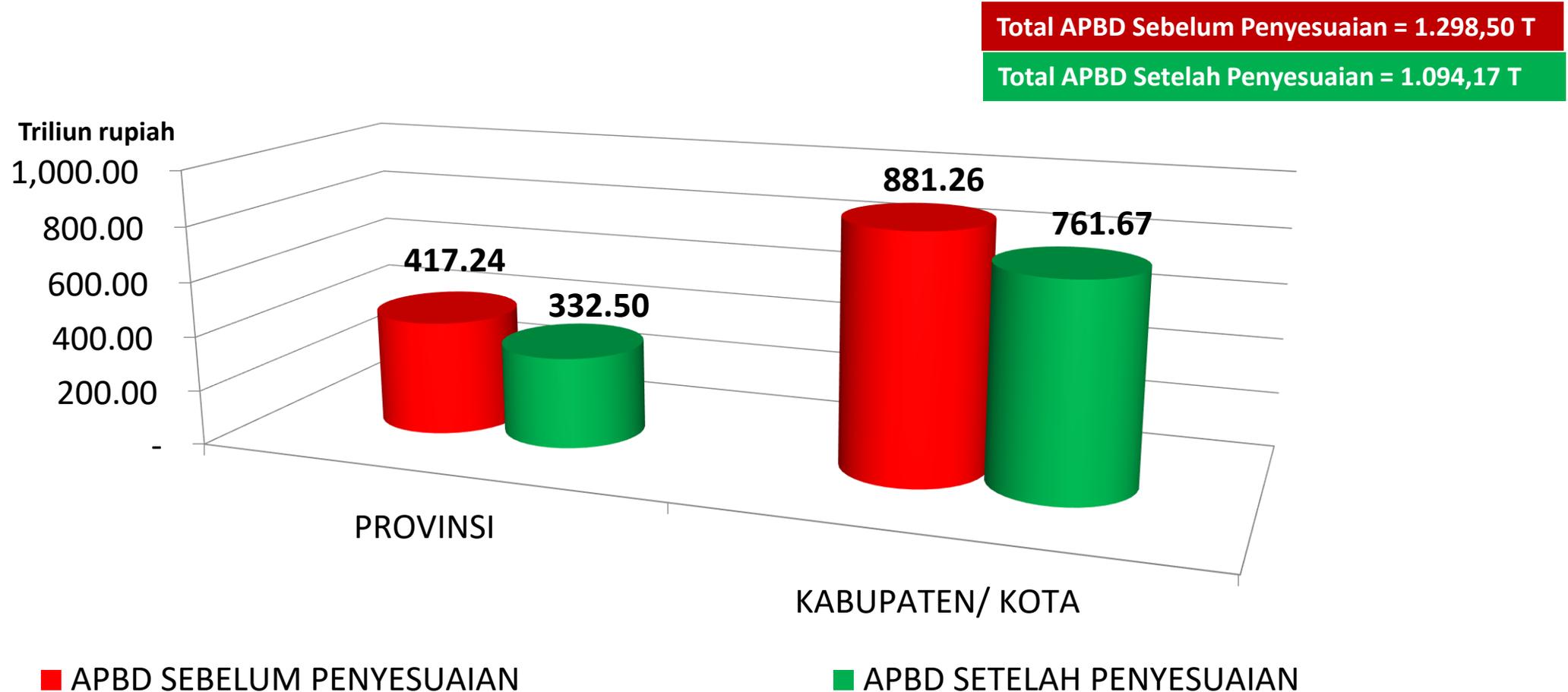
4

ATENSI

REFOCUSING & REALOKASI APBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2020

Update data: 10 Juni 2020, 16.00 WIB.

ALOKASI ANGGARAN DALAM APBD TA 2020 SEBELUM DAN SESUDAH PENYESUAIAN APBD



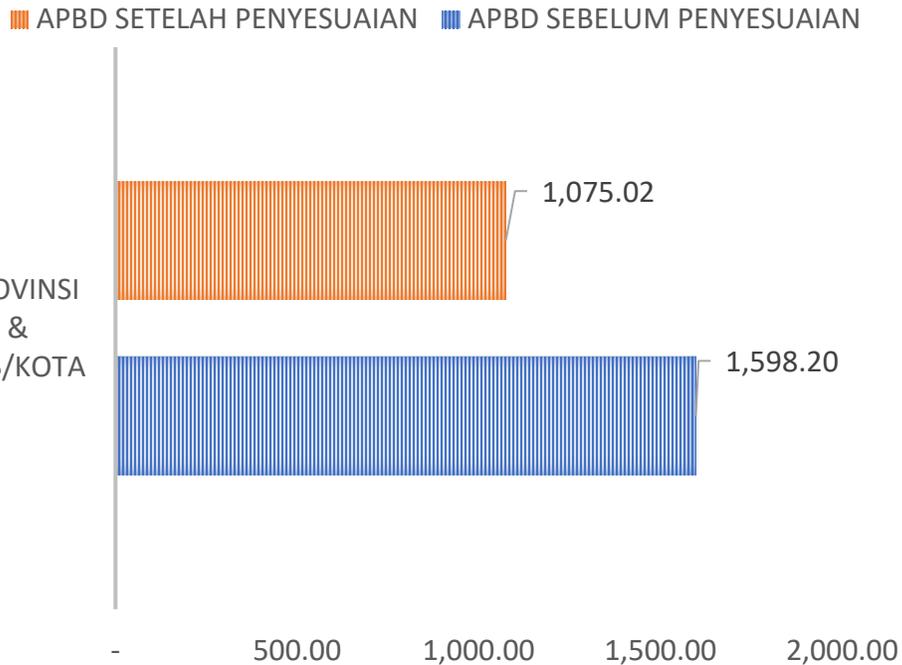
Sumber Data :

1. APBD Sebelum Penyesuaian, diolah dari 529 APBD Provinsi dan Kab/Kota TA 2020;
2. APBD Setelah Penyesuaian, diolah dari 526 (34 Prov, 402 Kab, 90 Kota) Surat Pemda terkait Penyesuaian APBD, Kementerian Dalam Negeri, 2020 (data bergerak)

PROFIL APBD PASCA *REFOCUSSING*

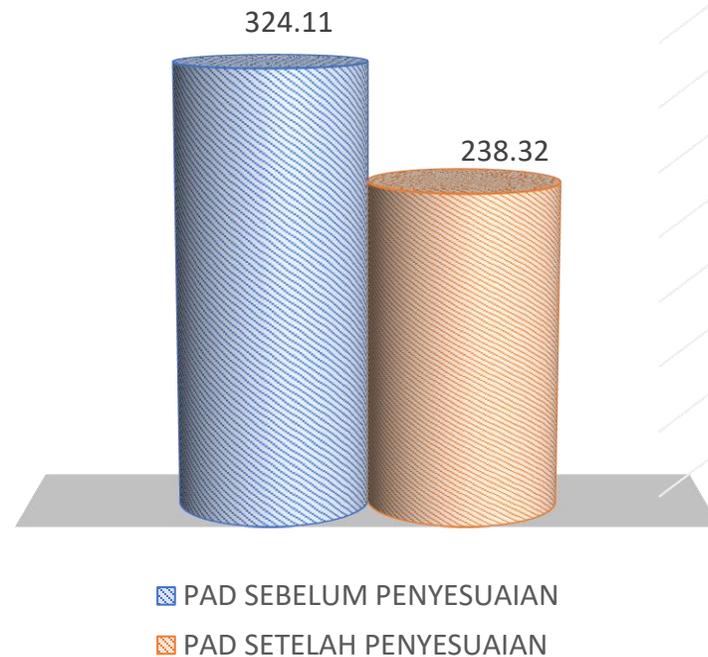
(APBD)

(PENDAPATAN)



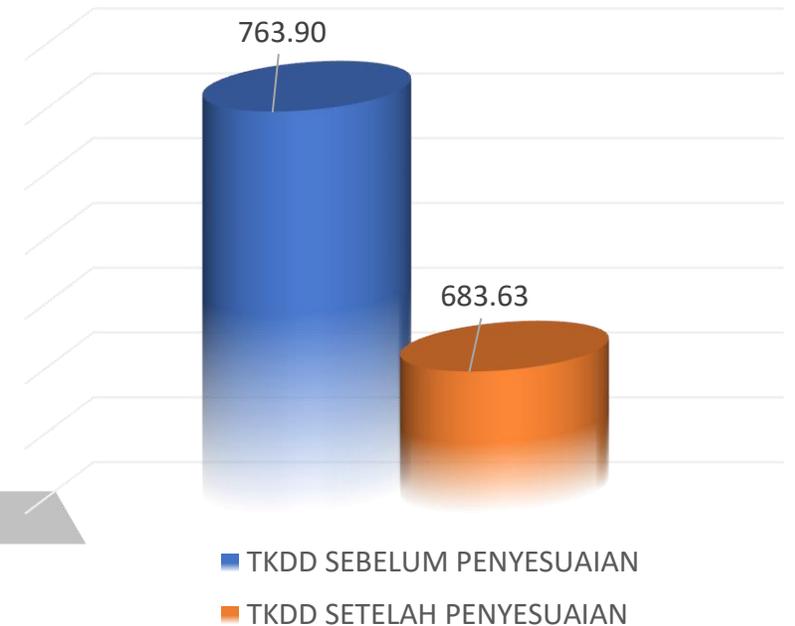
APBD TURUN 17,18%

ATAU SENILAI Rp223,48T



PAD TURUN 26,47%

ATAU SENILAI Rp85,78T

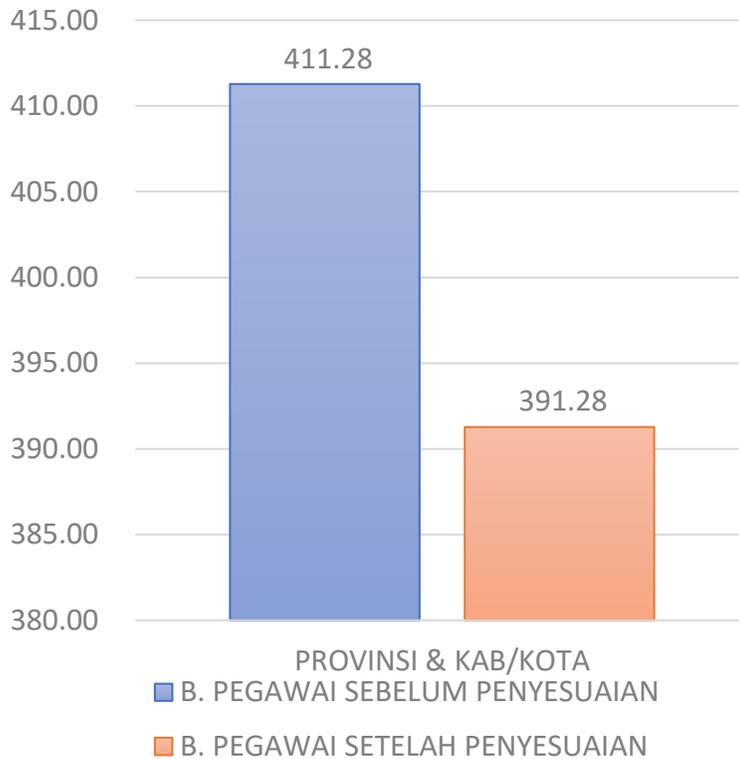


TKDD TURUN 10,51%

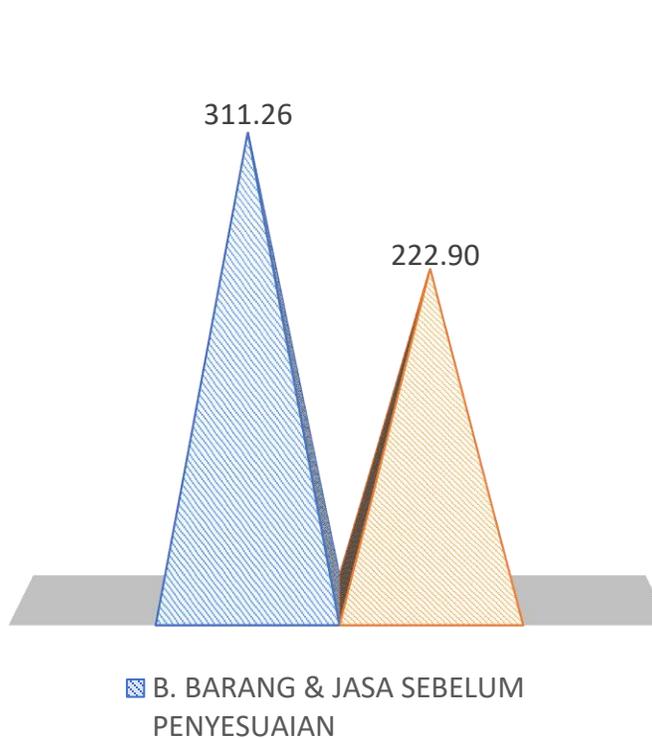
ATAU SENILAI Rp80,27 T

PROFIL APBD PASCA *REFOCUSSING*

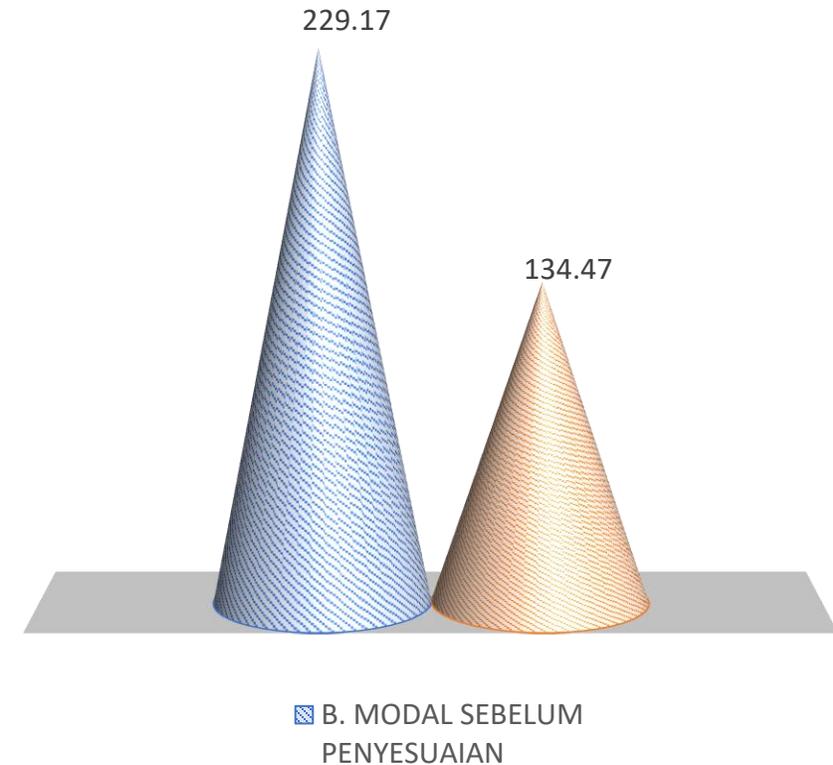
(BELANJA)



BLNJA. PEGAWAI
TURUN 4,86%
ATAU SENILAI Rp20 T



BLNJA. BARJAS
TURUN 28,39%
ATAU SENILAI Rp88,36 T



BLNJA. MODAL
TURUN 41,32%
ATAU SENILAI Rp94,70 T

ANGGARAN HASIL REFOCUSSING

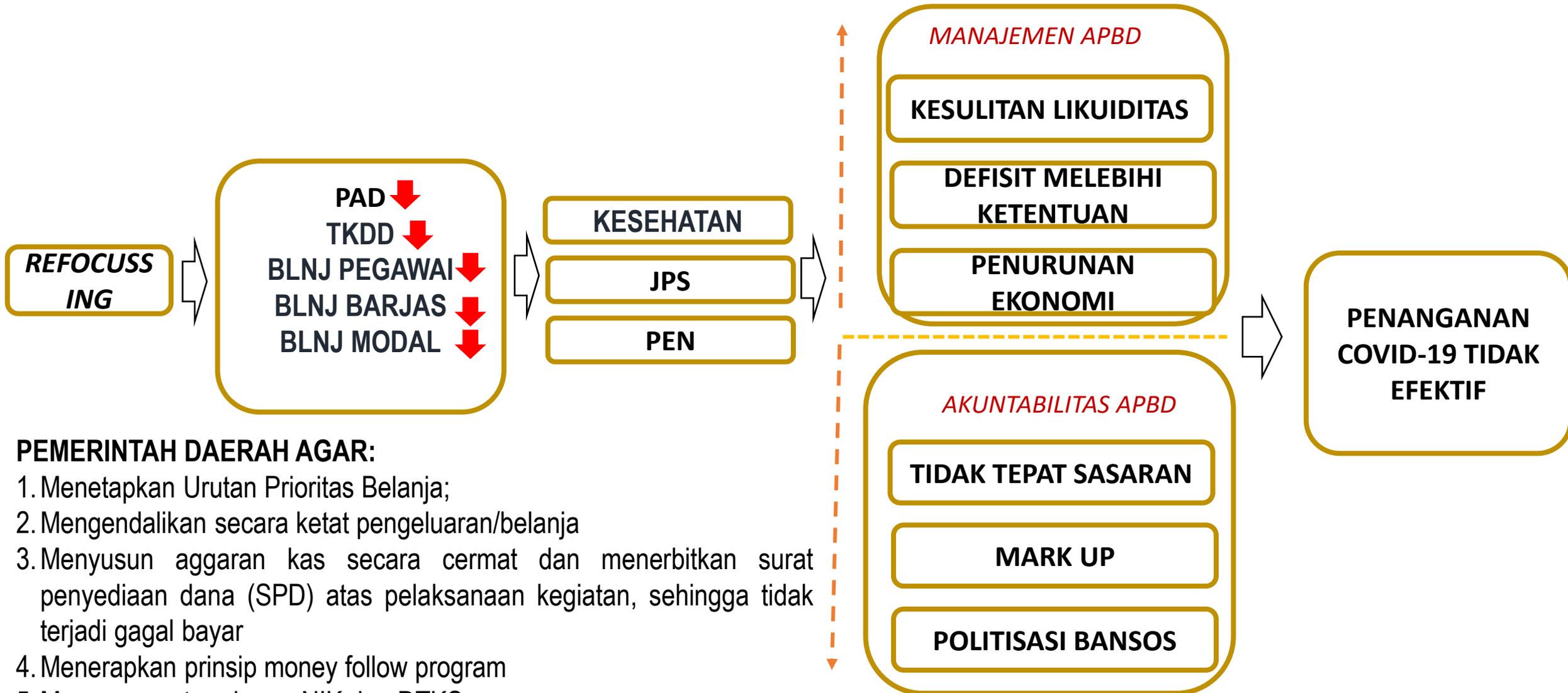


5 DAERAH TERBESAR PROSENTASE PENYESUAIAN APBD

NO	PROVINSI	PROSENTASE PENYESUAIAN APBD
1.	Prov. DKI Jakarta	(49,22%)
2.	Prov. Sulawesi Tenggara	(33,11%)
3.	Prov. Kalimantan Timur	(29,11%)
4.	Prov. Gorontalo	(26,86%)
5.	Prov. Nusa Tenggara Barat	(26,84%)

NO	KABUPATEN/KOTA	PROSENTASE PENYESUAIAN APBD
1.	Kab. Teluk Wondama*	(58,27%)
2.	Kab. Tulang Bawang Barat	(46,60%)
3.	Kab. Ogan Komering Ulu	(43,03%)
4.	Kab. Musi Banyu Asin	(39,97%)
5.	Kab. Nunukan	(39,19%)

RISIKO PENGELOLAAN APBD PASCA *REFOCUSSING*



PEMERINTAH DAERAH AGAR:

1. Menetapkan Urutan Prioritas Belanja;
2. Mengendalikan secara ketat pengeluaran/belanja
3. Menyusun anggaran kas secara cermat dan menerbitkan surat penyediaan dana (SPD) atas pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak terjadi gagal bayar
4. Menerapkan prinsip money follow program
5. Mempercepat padanan NIK dan DTKS



TUGAS BINWAS APIP DAERAH COVID-19

ORIENTASI PADA PENCEGAHAN DAN MITIGAS RISIKO MELALUI ASISTENSI DAN POST AUDIT

PERCEPATAN *REFOCUSING*
ANGGARAN

PENERIMAAN DANA SUMBER LAIN
YANG SAH DAN TDK MENGIKAT

ALOKASI BELANJA HIBAH DAN
BANSOS

KETERSEDIAAN ANGGARAN
KESEHATAN

KETERSEDIAAN ANGGARAN
PENANGANAN DAMPAK EKONOMI

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

KETERSEDIAAN PENYEDIAAN JARING
PENGAMAN SOSIAL (JPS)

KETERSEDIAAN ANGGARAN
KEADAAN DARURAT BERENCANA

PENATUSAHAAN BELANJA TIDAK
TERDUGA

PENGADAAN BARANG DAN JASA

KECUKUPAN PANGAN DAN
KEBERLANGSUNGAN INDUSTRI

TEMUAN APIP

PENGADAAN BARANG/JASA

Kelangkaan barang
Harga fluktuatif
Batang tidak sesuai standar

1

DATA BANSOS TIDAK AKURAT

Belum dipadankan dengan NIK

2

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA

Tidak sesuai/tidak tepat sasaran

3

DATA KATU PRAKERJA

Pemda tidak memperoleh data penduduknya yang memperoleh Kartu Prakerja karena langsung secara online ke Individu

4

KOMPETENSI SDM

Pemahaman refocusing/PBJ dll, sehingga terjadi kegamangan untuk belanja

5

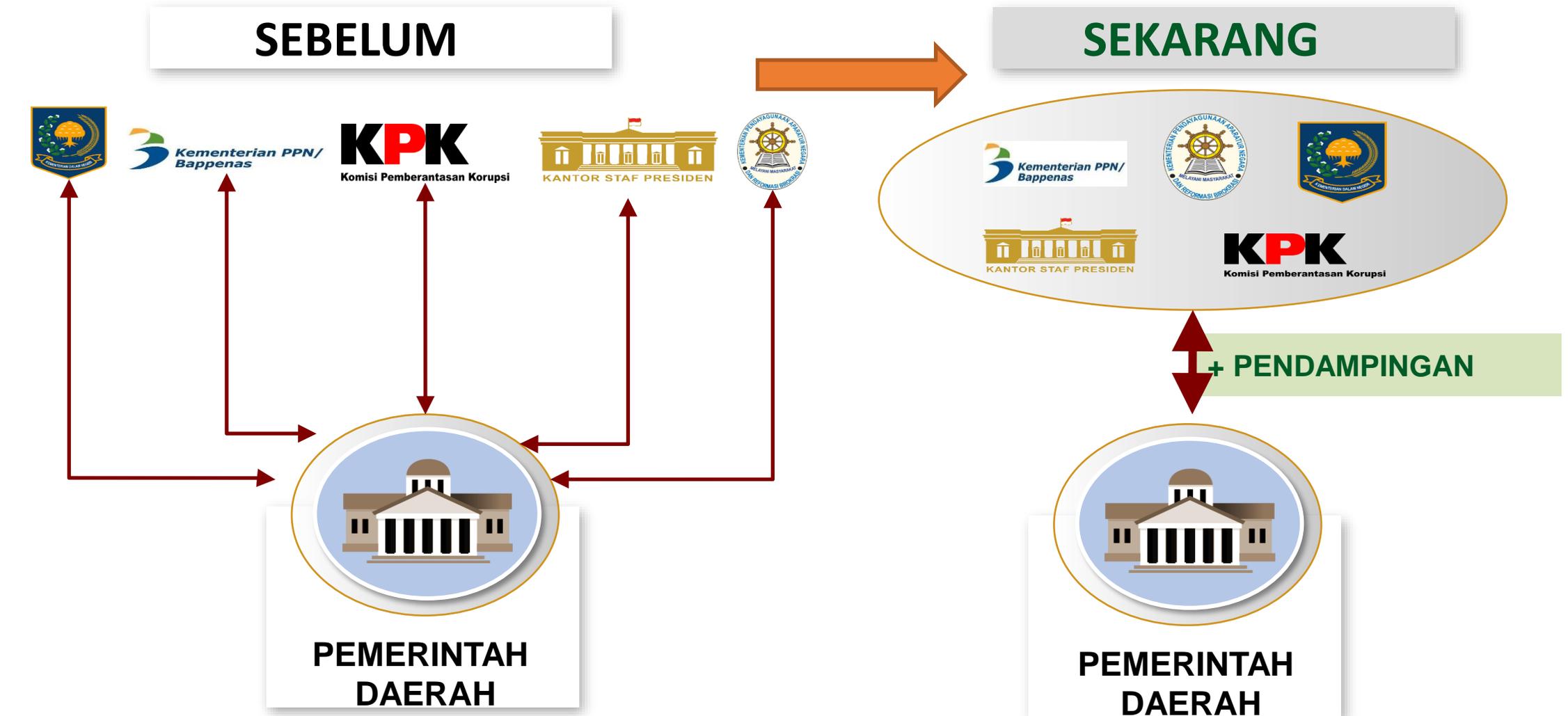
SUMBANGAN PIHAK III TIDAK DICATAT

Pemda tidak mencatat secara tertib sumbangan dari Pihak III

6

STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI (PERPRES 54 TAHUN 2018)

SINERGI DAN KOLABORASI BERSAMA PENCEGAHAN KORUPSI





11 AKSI PENCEGAHAN KORUPSI 2019-2020

PERIZINAN DAN TATA NIAGA

- 1 Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal
- 2 Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan
- 3 Utilisasi Nomor Induk Kependudukan untuk Perbaikan Tata Kelola Pemberian Bantuan Sosial dan Subsidi
- 4 Integrasi dan Sinkronisasi Data Impor Pangan Strategis
- 5 Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan Sektor Swasta

KEUANGAN NEGARA

- 6 Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik
- 7 Peningkatan profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa
- 8 Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Non-Pajak

PENEGAKAN HUKUM DAN REFORMASI BIRKORASI

- 9 Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- 10 Implementasi Grand Design Strategi Pengawasan Keuangan Desa
- 11 Perbaikan Tata Kelola Sistem Peradilan Pidana Terpadu



Aksi di K/L sebagai PJ



Aksi di Daerah sebagai PJ



CAPAIAN AKSI PENCEGAHAN KORUPSI PEMDA

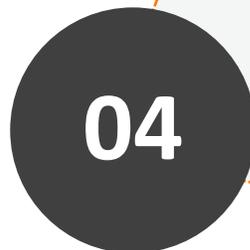
Pembentukan UKPBJ

- 431 Pemkab/Pemkot telah membentuk UKPBJ struktural
- 6 Pemkab yang mencapai Tingkat Kematangan UKPBJ level proaktif (9/9),



Percepatan pelaksanaan sistem merit

Baru akan dilaporkan pada bulan Juli (B18)



Implementasi e-Katalog

Terdapat 3 Provinsi yakni Aceh, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang telah melakukan penayangan barang/jasa katalog



Konsolidasi Pengadaan

Terdapat 4 (empat) Provinsi: DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah



ISU PENTING PENGELOLAAN BMD



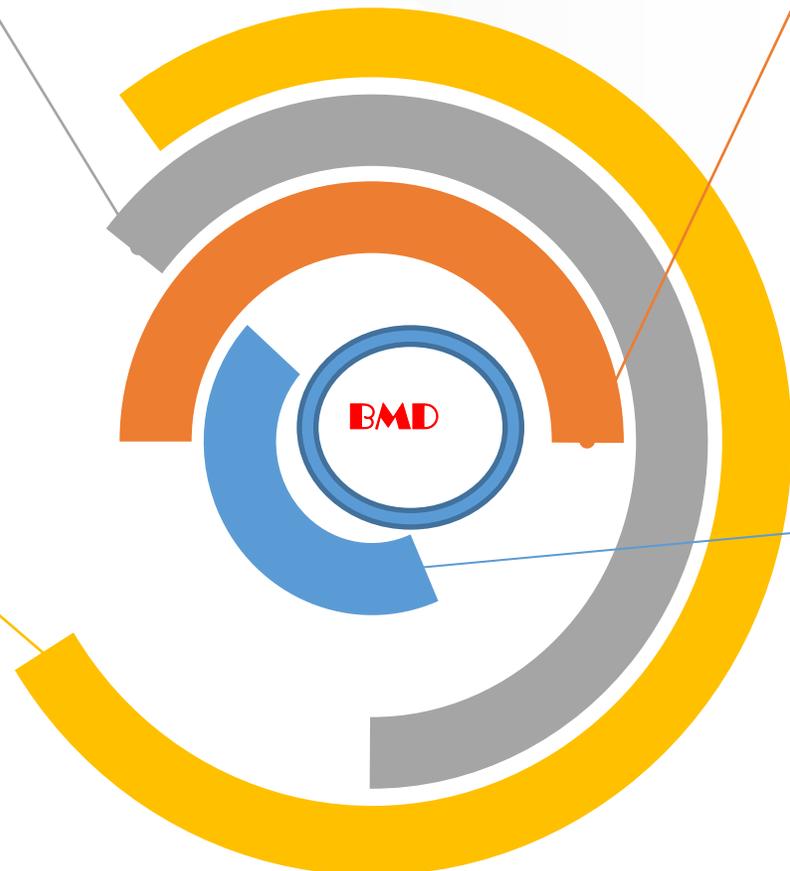
PENYERAHAN BMD

Belum tuntasnya penyerahan aset akibat pemekaran daerah dan penyerahan aset sesuai urusan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



BUKTI KEPEMILIKAN

Lemahnya bukti kepemilikan, belum bersertifikat



SISTIM APLIKASI

Pelaporan BMD Belum diyakini atau masih manual.



LEMAHNYA PENGAWASAN

Dikuasai pihak lain tidak sesuai ketentuan, BMD Hilang tidak ditemukan, BMD Idle tidak Optimal





3 (TIGA) KORELASI AREA INTERVENSI KORSUPGAH TERKAIT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD

- Tersedianya aplikasi perencanaan APBD
- Terdokumentasinya kegiatan Musrenbang, Pokir DPRD, dan Forum Perangkat Daerah
- Terdokumentasinya RPJMD
- Standar Satuan Harga (SSH)
- Analisis Standar Biaya (ASB)
- **Integrasi Perencanaan dengan Penganggaran** → Korelasi RKBMD dengan RKA
- Penganggaran APBD

OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH

- Adanya database WP yang handal
- **Inovasi Akselerasi Peningkatan Penerimaan Daerah** → Optimalisasi pendapatan yang berasal dari pemanfaatan Barang Milik Daerah

MANAJEMEN ASET DAERAH

- Tersedianya Sistem Pencatatan terkait BMD yang Handal
- Pemanfaatan BMD sesuai Aturan Perundangan
- Adanya Aturan Pemindahtanganan yang Sesuai Aturan yang Berlaku
- Legalisasi Kepemilikan BMD
- Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah



PERCEPATAN PENERTIBAN PENGELOLAAN BMD

SURAT MENDAGRI

No. 028/9253/Sj Tgl 10 September 2019
dan
No. 028/9254/Sj Tgl 10 September 2019

Pemerintah Daerah

01

PERCEPATAN PENGALIHAN BMD

- Pemekaran wilayah daerah sesuai peraturan perundang-undangan
- Adanya pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014

02

PENERTIBAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS

Sesuai Jumlah, Jenis dan pihak yang menggunakan (Permendagri No. 11 Th 2007 ttg Perubahan Atas Permendagri No. 7 Tahun 2006 ttg Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah

03

PENGELOLAAN BMD SESUAI PERMENDAGRI NO. 19 TAHUN 2016

- Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan BMD yang digunakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya atau Pihak Lain
- Menertibkan izin penghunian penggunaan rumah negara(rumah dinas)
- Membuat BAST pemakaian atas Kendaraan dinas dan rumah negara.
- Melaksanakan pengamanan fisik, administrasi dan hukum

04

MENGALOKASIKAN ANGGARAN PENERBITAN SERTIFIKAT Penguatan Alas Hak BMD

05

PERCEPATAN PENYELESAIN MASALAH LAINNYA

Penyelesaikan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan Per UU



ATENSI

MENINGKATKAN INTEGRITAS DAN KOMITMEN UNTUK MELAKSANAKAN AKSI-AKSI PENCEGAHAN KORUPSI SECARA NYATA

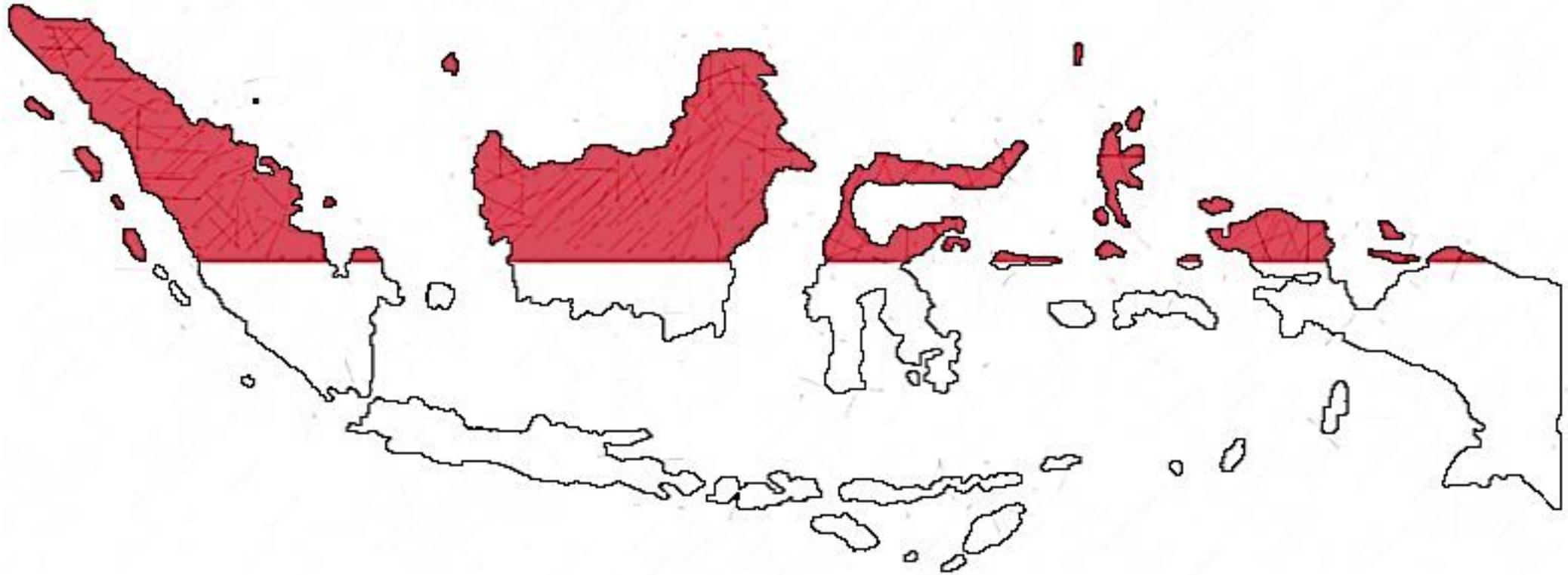
TIDAK MELAKUKAN PERSENGKOKOLAN, KICKBACK, GRATIFKASI, KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PBJ

MENINGKATKAN RASA EMPATI, PEDULI DAN TIDAK MELAKUKAN KORUPSI ATAU NIAT JAHAT (*MENS REA*) ATAS DANA BENCANA

MENJAGA LIKUIDITAS ANGGARAN SEHINGGA TIDAK TERJADI GAGAL BAYAR ATAU MENUMPUKNYA HUTANG PADA PIHAK III

MENERAPKAN PRINSIP "MONEY FOLLOW PROGRAM" BAGI PENANGANAN PANDEMI DENGAN PRIORITAS ANGGARAN UTK KESEHATAN, JARING PENGAMAN SOSIAL DAN PEMULIHAN EKONOMI

MELAKUKAN PEMADANAN NIK DENGAN DTKS SEHINGGA BANSOS DAPAT LEBIH TEPAT AKUNTABEL



Terima Kasih
